



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PIDATO KETUA BPK RI
PADA ACARA
PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KE-64
PROKLAMASI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA
DI LINGKUNGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

JAKARTA, 17 AGUSTUS 2009

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat Pagi dan
Salam Sejahtera bagi kita semua,

Pada kesempatan yang berbahagia ini, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas nikmat dan karuniaNya sehingga kita dapat menghadiri Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan ke-64 Republik Indonesia. Kita patut menyampaikan rasa terima kasih dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada para pejuang kusuma bangsa, yang telah mengorbankan jiwa dan raga untuk memperjuangkan berdirinya Republik Indonesia, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaannya.

Saudara-saudara yang saya hormati,

Peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI tahun 2009 ini memiliki makna tersendiri bagi saya secara pribadi dan bagi para anggota BPK periode 2004-2009.

Karena masa jabatan pimpinan BPK sekarang ini akan berakhir pada Oktober mendatang, upacara Peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI pada hari ini adalah merupakan upacara terakhir yang saya pimpin sebagai Ketua BPK. Atas nama semua Anggota BPK periode 2004-2009, dalam kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terimakasih kepada semua warga BPK atas hal-hal yang telah kita capai selama lima tahun terakhir kami memimpin lembaga ini.

Independensi dan otonomi BPK telah dapat kita pulihkan dengan diterbitkannya UU No. 15 Tahun 2006. Untuk meningkatkan kemampuannya, BPK tidak saja menambah personil dan membuka kantor perwakilan di semua Ibukota Provinsi. BPK pun telah mengajak Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk ikut memeriksa laporan keuangan sektor negara. Keikutsertaan KAP kita awali dari pemeriksaan BUMN dan BUMD yang merupakan produsen *private goods* yang memang merupakan kebolehan dari KAP.

Sebagai auditor eksternal, kewenangan BPK hanya terbatas pada pemberian opini pemeriksaan, saran maupun rekomendasi perbaikan. Setelah menyerahkan kepada DPR, BPK wajib mengumumkan secara luas hasil pemeriksaannya. Undang-Undang mewajibkan BPK untuk langsung melaporkan temuan pemeriksaannya yang memuat dugaan adanya unsur pidana kepada penegak hukum untuk disidik lebih lanjut. BPK sekaligus berwenang memantau perbaikan sistem keuangan negara berdasarkan saran dan rekomendasi pemeriksaannya. Dilain pihak, BPK tidak memiliki kewenangan membuat UU dan aturan maupun tindakan yang bersifat memaksa guna memperbaiki sistem keuangan negara. Berbagai jenis kewenangan yang disebut terakhir hanya diimiliki oleh Pemerintah dan DPR.

Saudara-saudara yang saya hormati,

Berbagai kewenangan BPK yang diberikan oleh UU No. 15 Tahun 2006 telah kita maksimir secara terukur untuk ikut mempercepat implementasi ketiga UU Keuangan Negara Tahun 2003-2004. Dalam kaitan ini, BPK telah memperluas objek pemeriksaannya baik pada sisi penerimaan maupun pengeluaran negara. Tadinya, terutama pada masa pemerintahan Orde Baru, BPK hanya memeriksa sebahagian dari

pengeluaran negara. Hampir tidak ada penerimaan dan hutang negara yang boleh diperiksa oleh BPK. Demikian pula dengan penjualan aset negara serta privatisasi BUMN dan BUMD. Hingga saat ini, tidak ada catatan lengkap tentang stok aset negara beserta statusnya. Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang pajak yang meniadakan akses BPK kepada informasi perpajakan telah kita laporkan pada tanggal 9 Januari 2008 kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Namun demikian, MK memberikan putusan yang tidak jelas sehingga hanya di Indonesia badan pemeriksa keuangan negara tetap tidak dapat memeriksa penerimaan negara dari pajak.

BPK pun telah meningkatkan mutu pemeriksaan, saran, maupun rekomendasinya. Untuk ikut serta membangun sistem keuangan negara, BPK telah mewajibkan seluruh *auditees* untuk membuat dan menyerahkan *Management Representation Letter*. BPK pun meminta seluruh *auditees* untuk menyerahkan Rencana Aksi secara konkrit di berbagai bidang dengan jadwal yang jelas untuk dapat meningkatkan opini pemeriksaan laporan keuangannya. BPK memantau dengan cermat implementasi Rencana Aksi yang disusun sendiri oleh pada *auditee* itu. UU No. 15 Tahun 2006 sekaligus memberikan kekuasaan *quasi-judicial* pada BPK dalam menghitung dan menetapkan kerugian negara terhadap Bendahara maupun dalam mengungkapkan adanya dugaan/indikasi unsur pidana dan/atau kerugian negara.

BPK tidaklah *grusa-grusu* dalam melakukan tindakan dan menggunakan kewenangan konstitusionalnya. BPK memberikan waktu yang memadai kepada *auditees* yang diduga melakukan penyimpangan untuk mengoreksi kesalahan dan mengembalikan kerugian negara sebelum melaporkan kasusnya kepada penegak hukum untuk dilakukan penyidikan. Secara perlahan tapi pasti, BPK telah menyakinkan aparat penegak hukum dan pemelihara keamanan akan pentingnya peranan pemeriksaan BPK sebagai fungsi manajemen dan kontrol. Sekarang justru Dephan/TNI, POLRI, dan Badan Intelijen Negara (BIN) yang menjadi pelopor dalam perbaikan sistem keuangan negara. BUMN/BUMD strategis seperti bank-bank negara semakin menyadari makna transparansi dan akuntabilitas bagi peningkatan kemampuan mereka bersaing di pasar global.

Depkeu semakin menyadari akan perlunya *Treasury Single Account*, inventarisasi aset negara serta transparansi maupun akuntabilitas dalam penerimaan pajak, PNBP, privatisasi BUMN/BUMD serta penjualan aset dan penerimaan negara dari hibah serta pinjaman. Tanpa itu, Menkeu tidak akan mengetahui bagaimana posisi keuangan negara dan tidak akan dapat meningkatkan peringkat Surat Utang Negara.

Dalam batas-batas kewenangannya, BPK memberikan bantuan kepada *auditees* tentang bagaimana membuat Rencana Aksi. BPK pun membantu *auditees* ikut mencarikan jalan keluar untuk mengimplementasikannya. BPK ikut berperan dalam pembangunan kelembagaan guna mensukseskan reformasi sosial: demokratisasi politik, otonomi daerah, globalisasi perekonomian, dan korporatisasi BUMN/BUMD. Untuk mengatasi kelangkaan SDM di dua Provinsi di Papua, BPK telah mengajak Depdagri dan Depkeu serta berbagai universitas untuk segera menyelenggarakan pendidikan khusus bidang perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah.

Saudara-saudara yang saya hormati,

Seluruh prestasi yang telah kita capai selama 5 tahun terakhir ini adalah merupakan buah dari jerih payah kita semua dan terjadi karena adanya kemauan seluruh jajaran BPK untuk merubah diri, meningkatkan integritas dan kemampuan teknis pemeriksaan. Auditor yang berprestasi telah diberikan penghargaan yang layak baik berupa bintang jasa ataupun kenaikan pangkat dan jabatan dipercepat. Dilain pihak, auditor nakal yang masih menerima uang sogok telah diserahkan untuk disidik oleh penegak hukum. Auditor yang melanggar kode etik, termasuk yang menjadi mata-mata instansi lain maupun LSM telah ditindak dengan tegas sesuai dengan aturan yang berlaku. Auditor BPK bukanlah seorang *wistle blower* karena ia memperoleh informasi mengenai suatu instansi pemerintah hanya karena mendapatkan penugasan resmi dari lembaga. Kalau auditor menyalah gunakan informasi pemeriksaannya secara semena mena, tidak akan ada *auditee* instansi pemerintah yang akan mau diperiksa oleh BPK.

Dalam 5 tahun terakhir, kita sudah berhasil memberikan contoh dan teladan sehingga *auditees* percaya pada opini pemeriksaan BPK dan bersedia mendengar saran

maupun rekomendasi kita. Juga telah semakin banyak instansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang telah menyerahkan MRL dan *Action Plan*nya kepada BPK. Walaupun LKPP masih memperoleh opini *disclaimer*, sudah ada peningkatan opini pemeriksaaan LKKL, termasuk bagi berbagai Departemen besar, seperti Departemen Perindustrian. Dalam rangka pembangunan kelembagaan, badan legislatif pun sudah menerima saran BPK untuk membentuk Panitia Akuntabilitas Publik (PAP) guna semakin dapat meningkatkan perannya dalam mengawasi keuangan negara dan menjalankan hak budjetnya.

Dewasa ini, BPK adalah merupakan satu-satunya lembaga pemerintahan yang paling transparan dan akuntabel di Indonesia. Laporan keuangannya diperiksa oleh KAP yang ditunjuk oleh Komisi XI DPR-RI dari tiga calon yang diusulkan oleh Departemen Keuangan. Mutu pekerjaan dan kinerjanya direviu oleh BPK negara lain. *Lead by example* BPK tercermin dari opini pemeriksaan KAP Hadori Yunus dan Rekan (untuk tahun 2006 dan 2007) serta Wisnu B. Suwito dan Rekan (pada tahun 2008) pada laporan keuangan BPK yang sudah menjadi Wajar Tanpa Pengecualian untuk kedua kalinya, pada tahun buku 2007 dan 2008. Sementara itu, hasil reviu ARK Negeri Belanda atas kinerja BPK sangat menggembirakan. Karena adanya peningkatan mutu kerja BPK, mitra kerja kita dari negara-negara lain semakin bersedia membantu BPK dalam hal penyusunan *Strategic Plan*, peningkatan mutu SDM maupun dalam kegiatan pembangunan kapasitas dibidang teknologi, kerjasama pemeriksaaan maupun pertukaran pengalaman. BPK negara-negara lain pun kini ingin belajar pada BPK-RI tentang *quality assurance* maupun melakukan audit investigasi.

Karena mutu pekerjaannya yang semakin meningkat dan sumbangannya yang semakin besar pada penghematan keuangan negara, Pemerintah pun telah mengikut sertakan BPK dalam program reformasi birokrasi pemerintahan. Anggarannya pun sudah meningkat secara berlipat ganda, apakah untuk meningkatkan jumlah dan kualitas SDM, menambah kantor perwakilan, meningkatkan penghasilan serta melakukan modernisasi alat kerja termasuk teknologi informasi. Gabungan antara peningkatan reputasi, penghasilan, dan fasilitas kerja tersebut telah memungkinkan BPK menarik tenaga-tenaga kerja yang semakin baik pula.

Saudara-saudara yang saya hormati,

Mengakhiri sambutan ini, saya berharap agar kerangka dasar dan kebijakan yang telah kita gariskan dan lakukan selama 5 tahun terakhir dapat kiranya Saudara-Saudara lanjutkan dan tingkatkan dimasa depan agar LKPP, seluruh LKKL maupun LKPD lebih cepat mendapatkan opini WTP dalam masa Pemerintahan Presiden SBY yang kedua, periode 2009-2014.

Demikian sambutan saya. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara.

Merdeka!

Dirgahayu Republik Indonesia!

Wabillahitaufik Walhidayah,

Wasalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Ketua,

Prof. Dr. Anwar Nasution